



Edutech 18 (3), 2019

EDUTECHJournal homepage : <http://ejournal.upi.edu/index.php/edutech/index>
EduTech
 EduTech
 JURNAL TEKNOLOGI PENDIDIKAN

TINGKAT KEPUASAN GURU TERHADAP KURIKULUM 2013

Oleh:

Mujahidil Mustaqim

Universitas Pendidikan Indonesia

Email: mujahidil.mustaqim@student.upi.edu

Abstrak. Artikel ini didasari atas terbitnya regulasi yang menyatakan adanya revisi kurikulum 2013. Regulasi baru ini merupakan jawaban yang diberikan pemerintah atas carut marut yang terjadi pada awal kehadiran kurikulum 2013. Kegaduhan kehadiran kurikulum 2013 tergambar dari tidak adanya uji coba kurikulum, kemudian berlanjut juga tidak ada sosialisasi dan pelatihan guru terhadap *how to* implementasikan kurikulum baru serta perubahan isi, pendekatan dan evaluasi yang dinilai cukup rumit dari sebelumnya. Pemerintah menganggap secara substansi kurikulum 2013 perubahan lebih baik dari kurikulum sebelumnya dan sesuai dengan kondisi kebutuhan di lapangan. Namun tidak demikian halnya dengan praktisi pendidikan dan implementator kurikulum di lapangan yang menilai bahwa kurikulum 2013 banyak mengalami kendala secara teknis dan sangat memberatkan guru. Tahun 2016, secara resmi keluar peraturan pemerintah baru guna menyelesaikan persoalan yang timbul. Dengan datangnya regulasi baru ini, dilakukan penelitian kuantitatif kepada guru tentang tingkat kepuasan guru terhadap revisi kurikulum 2013. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 90,85 % guru menyatakan puas dan setuju dengan kehadiran revisi kurikulum 2013. Tingkat kepuasan dilihat dari tiga dari empat pokok perbaikan yang ada dalam revisi kurikulum 2013, yakni, Pertama, sebanyak 78,27 % guru puas dengan upaya penataan kembali kompetensi sikap spiritual dan sosial pada semua mata pelajaran. Kedua, sebanyak 94,29 % guru mata pelajaran menyatakan setuju dengan koherensi KI-KD dan penyelarasan dokumen. Ketiga, dominasi guru mengungkapkan kepuasan mereka dengan pemberian ruang kreatif kepada guru dalam mengimplementasikan kurikulum dalam regulasi revisi kurikulum 2013.

Informasi Artikel :

Artikel diterima : 19 Mei 2019

Perbaikan : 20 Juli 2019

Diterbitkan 25 Oktober 2019

Terbit Online 29 Oktober 2019

Kata kunci: Revisi Kurikulum 2013; Profesionalisme Guru

A. PENDAHULUAN

Kurikulum itu seperti halnya makanan. Makanan yang diproduksi baik dalam skala besar maupun kecil merupakan hal yang pasti mempunyai *date expired*. Tidak ada makanan yang tidak pernah kadaluarsa. Yang membedakan adalah ada jenis makanan yang cepat

mengalami proses pembusukan dan ada yang lama. Cepat atau lambat makanan menjadi basi tergantung kepada kondisi lingkungan, bahan makanan itu sendiri dan berbagai faktor lainnya. Makanan yang sudah kadaluarsa melepaskan bau yang tidak enak, bentuk yang tidak lagi mempesona dan menghilangkan selera

makan. Dari segi kesehatan, tentu makanan yang basi tidak baik lagi untuk dikonsumsi dan hendaknya diganti dengan makanan yang *fresh*. Makanan yang segar dan mengandung nutrisi yang tinggi membuat kualitas kesehatan terjaga dan meningkatkan performa kerja sehari-hari.

Begitu juga halnya kurikulum. Kurikulum tak selamanya bisa dipakai sepanjang masa. Kurikulum hanya berlaku pada periode tertentu. Pada saat periode itu telah habis, maka kurikulum tak lagi berlaku. Kurikulum lama mulai ditinggalkan dan kurikulum dengan corak baru mulai beroperasi memenuhi kebutuhan zaman yang terus dan semakin cepat berubah. Nyatanya, kurikulum pendidikan pada masa penjajahan atau setelah kemerdekaan tidak dipakai lagi pada masa sekarang. Kalaupun digunakan, apakah konten yang ada pada kurikulum masa penjajahan relevan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik hari ini. Demikianlah kurikulum seperti hanya makanan. Berlaku ada masanya, dan saat masanya telah berlalu, maka kurikulum tak layak lagi dikonsumsi.

Sebuah kebiasaan yang sering didapati bahwa setiap pergantian kurikulum acap kali terjadi gesekan antara pemerintah dan guru sebagai praktisi di lapangan yang mengerti betul segala

belak-beluk penerapan kurikulum di kelas. Tidak lepas dari masalah pada kurikulum terakhir. Pada awal pengimplementasian kurikulum 2013 dimana-mana mengundang berbagai kritikan dan penolakan terutama dari guru-guru sebagai pihak utama yang berwenang dan bertanggungjawab dalam menerapkan kurikulum di lapangan. Nada sumbing yang lazim ditemukan mulai berdatangan seperti mengapa kurikulum harus diganti padahal guru dan peserta didik sudah betah dengan kurikulum lama, dan kenapa kurikulum harus diganti, membuat susah guru saja, serta merasa capek harus beradaptasi lagi dengan kurikulum baru.

Polemik pada kurikulum 2013 intinya terletak pada ketidaksiapan guru dan personil sekolah dalam melaksanakan kurikulum baru. Guru dan sekolah dinilai *shock* harus menerapkan kurikulum baru tanpa ada sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah sebelumnya. Maka wajar terjadi penolakan di berbagai daerah untuk menerapkan kurikulum yang baru saja dilegalkan. Pada sisi lain, pemerintah bisa saja beralasan bahwa sosialisasi kurikulum dan pelatihan dapat dilakukan secara bersamaan ketika kurikulum diterapkan. Pemerintah memandang bahwa bagaimana kurikulum baru ini cepat dilaksanakan tanpa bagaimana implementator harus siap terlebih dahulu. Menyiap-

kan implementator untuk kurikulum baru dinilai buang-buang waktu dan tidak efisien dimana sementara hal ini dapat dilakukan secara bersamaan. Namun, praktisi memandang sebaliknya, sosialisasi harus dilakukan sebelum kurikulum tersebut diterapkan sehingga guru sebagai tokoh utama keberhasilan rancangan kurikulum sudah betul-betul siap dengan kurikulum baru. Belum lagi, jika berbicara tidak ada uji coba kurikulum baru dalam skala kecil terlebih dahulu.

Pada konsepnya, sosialisasi berguna untuk mengurangi hal-hal yang tidak pasti pada implemmentasi nantinya, membantu implementator membangun koordinasi dalam bekerja, memahami tugas dan peran yang diampu sehingga dia bisa berhasil dalam pekerjaannya (Waldeck, 2004). Dalam konteks kurikulum, sosialisasi dinilai sangat penting untuk memahami apa yang terjadi pada kurikulum sebelumnya sehingga lahir kurikulum baru. Pada dasarnya, sosialisasi bertujuan setidaknya bagaimana guru siap berinteraksi dalam hal ini yaitu dengan kurikulum baru. Sosialisasi juga pada prinsipnya mempunyai dampak yang signifikan pada performa guru dalam mengimplementasikan kurikulum di kelas (Bengston, 2014). Dalam kurikulum pendidikan polisi disebutkan bahwa

sosialisasi kurikulum yang dilakukan oleh keluarga terbukti memainkan peran yang esensial dalam mengurangi dampak negatif yang akan terjadi dalam pembentukan jati diri polisi dalam diri anak dan proses pembelajaran nantinya (Machado, 2006).

Selain sosialisasi yang tidak dapat ditinggalkan, pelatihan guru juga mestinya juga demikian. Pelatihan kepada guru-guru dapat memberi kontribusi terutama pada sekolah yang kurang berprestasi, sekolah yang berada pada daerah yang kurang berkembang, dan sekolah-sekolah dimana siswa butuh perhatian pendidikan yang lebih (Wang, 2019). Dalam segi kompetensi guru ditemukan bahwa guru yang mengikuti pelatihan memiliki skor yang jauh lebih tinggi dari sisi kognitif dan afektif daripada guru yang tidak menjalani pelatihan dalam mengimplementasikan kurikulum. Begitu juga dengan peserta didik dimana peserta didik yang gurunya mengikuti pelatihan mempunyai skor yang lebih tinggi daripada peserta didik yang diajarkan oleh guru yang tidak ikut serta dalam pelatihan (Allison, Silverman, & Dignam, 1990).

Salah tuding dan menyalahkan pun terjadi hingga pada lembaga pemerintah. Polemik Kurikulum 2013, Anies Salahkan M Nuh merupakan *headline*

berita yang dipasang oleh oleh *okezone* dimana Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu menyesalkan dan menyindir regulasi kurikulum baru yang dinilai keliru yang diambil pada menteri sebelumnya, Muhammad Nuh. Persoalan ini kian memanas sampai-sampai polemik ini tidak hanya terjadi pada kalangan dasar dengan atas namun juga pada kalangan atas dengan atas. Sebuah persoalan yang ditinggalkan pemerintahan lama yang mesti diselesaikan oleh pemerintahan baru.

“Semuanya terlalu cepat. kurikulum 2013 disusun oleh tim di akhir 2012. Kemudian awal 2013, diterapkan di 3 persen jumlah sekolah di Indonesia. Lalu 2014, diterapkan di 218 ribu sekolah. Telalu cepat. Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Pasal 94 memberi batas waktu selama tujuh tahun untuk menerapkan kurikulum baru, jelas Anies (Riyani, 2014).”

Akibatnya, kurikulum yang baru saja disahkan secara hukum harus dihapuskan. Kompas dalam salah satu headline beritanya berjudul “Mulai Semester Genap, Kurikulum 2013 Dihentikan” memaparkan bahwa pelaksanaan kurikulum 2013 resmi dihentikan dan kembali pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum yang bertujuan ingin memuaskan tuntutan

perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik yang sudah mulai berubah serta memoles mutu pendidikan supaya lebih mulus harus berhenti tengah jalan dan kembali pada corak kurikulum lama.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menginstruksikan sekolah yang belum menggunakan Kurikulum 2013 selama tiga semester untuk kembali ke Kurikulum 2006. Sementara itu, sekolah yang telah menjalankan selama tiga semester diminta tetap menggunakan kurikulum tersebut sembari menunggu evaluasi dari pihak berwenang. “Dengan memperhatikan rekomendasi tim evaluasi implementasi kurikulum, maka Kurikulum 2013 dihentikan, ujar Anies (Putera, 2014).”

Ada keyakinan besar bahwa kurikulum diganti bukan terjadi tanpa apa-apa. Selalu ada penjelasan yang jelas dan niat yang baik mengapa kurikulum harus berganti. Upaya pengembangan kurikulum merupakan upaya yang maju. Artinya ada beberapa kondisi pendidikan yang ingin diperbaiki dan ditingkatkan pada kurikulum baru. Ini juga mempunyai arti kurikulum baru di dalamnya terdapat gerbakan baru meningkatkan kualitas *output* lulusan yang mungkin belum dilakukan oleh pendidikan Indonesia di-

mana negara-negara lain sudah melakukannya bertahun-tahun lalu. Dalam pespektif ini, Indonesia barangkali dipandang sudah harus dan cukup mampu melakukan gebrakan itu melalui perubahan kurikulum.

Namun, titik persoalannya adalah pengimplementasian kurikulum tidak didahului dengan sosialisasi dan pelatihan sehingga hal ini menyebabkan kurikulum yang sudah dirancang dengan baik dan bertujuan baik tidak dilihat sebagai sebuah hal yang baik. Karena pada dasarnya perancangan, sosialisasi kurikulum dan pelatihan merupakan satu paket yang tak bisa dipisahkan agar implementasi kurikulum dapat berjalan lancar dan hal-hal yang diekspektasikan dalam kurikulum baru bisa tersampaikan kepada peserta didik dengan optimal, efektif dan efisien serta tepat sasaran. Maka dari pada itu, masalah sebenarnya adalah bukan pada kurikulum barunya saja tapi lebih kepada ketidaksiapan guru dan sekolah dalam menerapkannya yang seyogyanya polemik ini sudah dapat teratasi jika ada sosialisasi dan pelatihan serta buku bahan ajar. Anis Baswedan menegaskan sebagai berikut:

Menurut Anies, K-13 diterapkan saat guru belum siap sepenuhnya. Ketidaksiapan guru berasal dari karut-marutnya distribusi buku panduan

dan tidak efektifnya pelatihan. Padahal, kata Anies, guru adalah kunci utama menyukseskan penerapan kurikulum tersebut. Ia berpendapat, akan lebih baik memfokuskan pelatihan guru sebelum benar-benar K-13 diterapkan (Akuntono, 2014).

Sosialisasi kurikulum dan pelatihan merupakan salah satu persoalan utama di awal kehadiran kurikulum 2013. Pada hakikatnya Ormar Hamalik (2008) memandang ini merupakan salah satu diantara dari sekian persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum, yaitu proses sosialisasi kurikulum tidak maksimal sehingga tidak mengenai sasaran (guru, personel sekolah, siswa, orangtua siswa dan masyarakat pemakai tamatan dll). Akibatnya guru tidak mengerti betul apa substansi kurikulum baru dan tidak semua aparat yang *well come* terhadap kurikulum baru bahkan ada yang menerima dengan sikap apatis.

Oleh karenanya, sosialisasi kurikulum benar-benar menjalankan fungsinya terhadap perubahan yang dibawa. Pada sosialisasi, guru sebagai implementator hendaknya memahami perubahan kurikulum. Pertama, pemahaman tentang perubahan yang akan dilakukan secara personal dan kelompok serta bagaimana informasi dan ide baru bisa diterima dan diimplementasikan di sekolah. Kedua,

pemahaman tentang antara kaitan perubahan kurikulum dengan konteks kultur sekolah (Ansyar, 2015). Selain itu, hendaknya dalam konteks sosialisasi kurikulum, perubahan yang dibawa akan lebih menyentuh masalah manusia jika ransangan perubahan muncul dari perasaan dan emosi (Syafaruddin, 2008). Artinya sosialisasi kurikulum dinilai berhasil jika objek sosialisasi betul-betul merasakan secara emosional dan memahami pentingnya perubahan yang dibawa serta mengerti betul dampak yang akan ditimbulkan jika perubahan tidak terjadi.

Maka dari pada itu, sosialisasi sebagai bagian sentral dan nomor *wahid* dari langkah-langkah yang ditempuh dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan, antara lain diinisiasi dari sosialisasi kebijakan, penerapan kebijakan tanpa sanksi, penerapan kebijakan dengan sanksi dan terakhir evaluasi kebijakan (Hasbullah, 2015).

Permendikbud nomor 160 tahun 2014 tentang pemberlakuan kembali kurikulum 2006 dan sikap pemerintah adalah langkah yang diambil terhadap persoalan kurikulum 2013. Melalui regulasi ini, Indonesia menggunakan dua macam kurikulum pada waktu yang bersamaan. Sementara sekolah yang dinilai belum siap melaksanakan kurikulum 2013, tidak dipaksa menerapkan kurikulum 2013

dan dapat kembali ke kurikulum 2006 sambil mempersiapkan diri untuk menggunakan kurikulum 2013. Sedangkan sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013 selama tiga semester tetap menggunakan kurikulum 2013 (Rusman, 2015). Pemberlakuan kebijakan ini diatur dalam petunjuk teknis yang rapi dan hati-hati sehingga tidak menimbulkan polemik baru atau setidaknya dapat meredam gejolak yang ada. Sementara itu, gerakan sosialisasi kurikulum dan pelatihan terus digenjot oleh pemerintah agar penerapan kurikulum 2013 dapat berjalan maksimal.

Sungguhpun demikian, keputusan ini diambil pemerintah untuk menangani polemik yang ada juga tidak lepas dari pro kontra. Pemerintah dianggap tidak konsisten, bertele-tele dan bermain-main dalam mengambil keputusan besar seperti ini. Pemerintah tidak tahu imbas bagaimana sulit dan runyamnya bagi implementator di lapangan akibat regulasi yang tidak matang dan berubah-ubah sesuai selera penguasa. Pertikaian antara regulator yang memerintah di masa yang berbeda merugikan dan menyusahkan orang-orang yang langsung melakoni regulasi di lapangan. Menyusahkan jika bermanfaat bagi perbaikan pendidikan, tentu tidak apa. Akan tetapi sebaliknya, menyusahkan akibat hal-hal yang sia-sia

dan imbas dari keputusan yang keliru dan perselisihan serta ego penguasa yang berbeda di dua masa tentu ini benar-benar membuang-buang waktu dan energi.

Dalam perjalanannya, pemerintah melakukan evaluasi terhadap kurikulum 2013 yang menimbulkan kegerahan di tangan praktisi dan implementator. Muhammad Nuh, Menteri sebelumnya menggarisbawahi tidak ada yang salah dengan konten kurikulum 2013, akan tetapi masalah sebenarnya barangkali pada hal yang teknis. Carut marut kehadiran kurikulum 2013 berlanjut pada penanganan selanjutnya yaitu dengan menerbitkan regulasi revisi kurikulum 2013. Revisi ini merupakan jawaban dari banyaknya komplain dari berbagai praktisi pendidikan pada kurikulum 2013.

Ruslan dkk (2016) mengungkapkan dalam penelitiannya antara lain pertama, kendala yang dialami oleh guru-guru di SD Kabupaten Pidie adalah banyaknya aspek yang harus dinilai dalam penilaian Kurikulum 2013. Kedua, penilaian dilakukan bersamaan dengan proses pembelajaran, sehingga membuat proses belajar mengajar menjadi kurang efektif. Ketiga, guru merasa terbebani karena harus menjumlahkan setiap nilai yang diperoleh siswa secara keseluruhan lalu mendeskripsikan nilai yang didapat ter-

sebut per mata pelajaran. Dengan demikian, salah satu keluhan guru di lapangan dengan kehadiran kurikulum 2013 adalah penilaian yang sangat memberatkan dan rumit.

Mohammad Ansyar (2015) menjelaskan bahwa banyak hal yang menjadi penyebab penolakan kurikulum baru oleh guru, antara lain keharusan guru meningkatkan basis pengetahuan sebagai tambahan kerja tanpa insentif, perubahan kurikulum tanpa tambahan waktu dan finansial, materi, dana, peralatan, alat bantu belajar, dan metode baru tanpa ditunjang dana dan latihan pelaksanaan kurikulum baru dan kecepatan perubahan yang menimbulkan dugaan jika inovasi lain muncul sehingga membuat usaha perbaikan yang telag dilakukan sebelumnya menjadi sia-sia dan terakhir kekhawatiran bahwa perubahan hanya bertahan sebentar.

Maka artikel ini mengulas bagaimana respon guru terhadap produk revisi kurikulum 2013 sebagai pihak yang paling dekat dan bersetuhan langsung dengan realitas praktik pendidikan sehari-hari. Selain itu, juga sosok yang paling mengenal problema penerapan kurikulum di lapangan. Karena sejatinya guru mesti menyadari betul bahwa kurikulum baru yang diterapkan di kelas benar-benar sebuah terobosan kreatif dan

dirasakan penting serta tepat untuk diajarkan kepada peserta didik. Bilamana guru tetap bersikukuh dengan persepsi sendiri bahwa kurikulum baru tak ubahnya sama dengan kurikulum lama atau hanya menambah beban kerja guru yang sudah banyak maka tanpa disadari kurikulum baru tidak akan memberi banyak manfaat pada peserta didik. Karena jika guru merespon kurikulum baru bukanlah kebutuhan yang penting yang harus dikuasai peserta didik, bagaimana pembelajaran akan membuat peserta didik berkembang kompetensi seperti yang diharapkan oleh kurikulum baru.

Maka respon kepuasan guru terhadap kurikulum menjadi penting karena jika kurikulum baru masih menjadi polemik pribadi dalam diri guru dan guru tidak *respect* terhadap pembaharuan kurikulum maka sebarang apapun penting substansi yang terkandung dalam kurikulum baru tidak akan tersampaikan optimal kepada peserta didik. Dengan demikian, artikel ini ingin menyuguhkan seperti apa umpan balik guru terhadap revisi kurikulum 2013 yang memuat keluhan, masukan, respon guru saat kurikulum 2013 diterapkan di lapangan. Karena apa yang dianggap bagus oleh pemerintah untuk diimplementasikan, boleh jadi kurang tepat untuk diterapkan melihat dari sudut pandang konteks dan kondisi lapangan.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan angket kepada koresponden. Angket diisi oleh guru yang sudah menerapkan revisi kurikulum 2013 di kelas. Angket dibagikan kepada masing-masing guru mata pelajaran di salah satu jenjang Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung. Setelah angket dibagikan dan dikembalikan kepada peneliti, angket kemudian diolah dan diinterpretasikan serta dibahas sesuai dengan kajian teori yang mendukung. Pada tahap akhir, hasil penelitian yang sudah dibahas ditarik menjadi beberapa butir kesimpulan untuk mendapatkan gambaran umum dari artikel yang ditulis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara pemerintah bekerja dan melihat suatu regulasi dengan praktisi di lapangan kerap menampakkan jurang perbedaan yang lebar. Tidak sedikit konflik yang terjadi dan ini dinilai lumrah karena sulit untuk menyamakan persepsi bagaimana cara melakukan sesuatu walaupun tujuan yang akan dituju sama. Namun demikian, sebuah kebijakan yang memiliki sifat alami memaksa harus mempertimbangkan kondisi dimana kebijakan itu diberlakukan terutama orang-orang yang akan terlibat langsung dalam penerapan kebijakan tersebut. Sehingga kebijakan

yang dibuat dapat tepat sasaran dan terlaksana dengan optimal. Penolakan merupakan hal yang biasa dalam sebuah kebijakan baru namun bagaimana kebijakan bisa diterima dengan baik adalah tantangan yang harus diselesaikan. Maka kebijakan haruslah berdasarkan pada kebutuhan global dan masyarakat dan lebih penting lagi, pihak yang terjun langsung penerapan kebijakan harus menyadari dan memahami apa yang dimaksudkan oleh pemerintah melalui kebijakan tersebut. Sebaliknya, pemerintah harus memahami juga tantangan yang dihadapi implementator dalam menyusun teknis penerapan kebijakan sehingga bisa menyusun pedoman teknis yang sederhana dan tidak memberatkan namun substansi kehadiran kebijakan tersebut tetap dapat dicapai dengan maksimal. Kesamaan persepsi dan saling memahami antara regulator dan implemmentator yang menjadi kunci keberhasilan penerapan regulasi di lapangan. Implementator paham apa yang regulator mau dan regulator paham kondisi serta rintangan yang akan implementator lakukan ketika regulasi tersebut dibuat dan dilaksanakan.

Nanang Fattah (2014) menyebutkan bahwa usulan gagasan kebijakan harus diuji berdasarkan pertimbangan apakah gagasan tersebut benar-benar dapat di-

jabarkan menjadi kegiatan yang lebih operasional dalam suatu sistem manajemen. Jika jabaran operasional memungkinkan, maka pertanyaan yang akan timbul apakah pelaksanaan kebijakan tersebut didukung oleh sumber-sumber yang tersedia. Suatu gagasan kebijakan yang muncul sering memiliki sifat terlalu ideal dan sulit dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang operasional yang dapat didukung oleh tenaga, fasilitas, dan waktu yang tersedia di dalam suatu pengelolaan. Gagasan seperti ini secara operasional tidak dapat diterapkan. Pihak-pihak yang secara potensial dapat menolak atau menerima pertimbangan ini adalah para pengelola, para pelaksana dan lain-lainnya. Maka atas dasar ini, wajar saja jika kehadiran kurikulum 2013 banyak mengalami penolakan dimana secara analisis administratif mengalami masalah, seperti tidak ada sosialisasi kurikulum, pelatihan, buku bahan ajar yang bermasalah, banyak sekolah yang tidak siap termasuk dari segi fasilitas, dan sebagainya.

Menanggapi permasalahan ini, pemerintah melakukan evaluasi terhadap kurikulum 2013 dan bentuk evaluasi tersebut tertuang dalam regulasi revisi kurikulum 2013. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengungkapkan bahwa terdapat empat pokok permasalahan ku-

rikulum 2013, yaitu Pertama, kompleksitas pembelajaran dan penilaian pada sikap spiritual dan sosial. Kedua, ketidakselarasan antara KI-KD dengan silabus dan buku. Ketiga, penerapan proses berpikir 5 M sebagai media pembelajaran yang bersifat procedural dan mekanistik. Keempat, pembatasan kemampuan siswa melalui pemenggalan taksonomi proses berpikir antar jenjang. Beranjak dari rumusan empat persoalan ini maka lahir empat pula solusi yang ditawarkan guna memperbaiki rancangan kurikulum 2013 yang ketika sudah diujikan di lapangan dinilai keliru dan mengundang respon negatif publik. Pertama, penataan kompetensi sikap spiritual dan sosial pada semua mata pelajaran. Kedua, koherensi KI-KD dan penyelarasan dokumen. Ketiga, pemberian ruang kreatif kepada guru dalam mengimplementasikan kurikulum. Keempat, penataan kompetensi yang tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi proses berpikir (Kemdikbud, 2016).

Untuk mendapatkan informasi seperti apa respon di lapangan maka dilakukan penelitian mengenai tingkat kepuasan guru dalam menerapkan revisi kurikulum 2013. Hasilnya menyebutkan bahwa 90,85 % guru merasa puas dan setuju mengimplementasikan revisi kurikulum 2013. Tidak terlihat lagi pe-

nolakan seperti yang terjadi di awal kemunculan kurikulum 2013. Hal ini menandakan bahwa guru merasa nyaman dengan revisi kurikulum 2013 yang diiringi dengan sosialisasi dan pelatihan kurikulum di berbagai daerah. Penolakan secara perlahan-lahan berkurang dan penerimaan bahwa substansi yang dibawa oleh revisi kurikulum 2013 mulai disadari sebagai hal yang harus dikuasai peserta didik untuk zaman sekarang dan persiapan kompetensi masa depan. Sebagai pihak yang paling berpengaruh di kelas, guru melihat tantangan apa yang berada yang ada di depan. Yunus Abidin (Abidin, 2014) menyebutkan guru dalam upaya implementasi kurikulum 2013 harus mengajar agar siswa mampu mengkonstruksi makna, membentuk kemampuan berpikir tingkat tinggi, melaksanakan model pembelajaran aktif berbasis proses saintifik dan dalam kondisi globalisasi pendidikan guru juga harus mampu mengajar dalam situasi masyarakat yang multikultur.

1. Tingkat Kepuasan Guru terhadap Penataan Kompetensi Sikap Spiritual dan Sosial

“Bagaimana kita (guru) mampu mengajarkan dengan baik spiritual anak padahal kita sebagai guru mata pelajaran umum tidak menguasai baik ilmu

-ilmu keagamaan,” merupakan ungkapan sejumlah guru menanggapi kebijakan kurikulum 2013 yang mesti mereka jalankan. Keterbatasan informasi mengenai barang baru akibat minim sosialisasi dan pelatihan mengakibatkan guru kebingungan bagaimana seharusnya menerapkan. Banyak persepsi yang beragam terhadap implementasi kurikulum baru. Bukan hanya sampai disitu, keterbatasan kompetensi guru menjadi masalah yang barangkali luput dari pertimbangan regulator.

Kurikulum 2013 di awal secara jelas meminta masing-masing guru mata pelajaran pada semua jenjang terintegrasinya KI 1 (sikap spiritual) dan KI 2 (sikap sosial) pada setiap mata pelajaran sehingga setiap mata pelajaran umum (selain agama dan Pkn) tidak hanya bermuatan kognitif (pengetahuan) dan keterampilan semata. Dengan kata lain, masing-masing guru mata pelajaran tanpa terkecuali wajib mengajarkan bagaimana peserta didik mempunyai kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan (Rusman, 2015).

Bukanlah masalah yang berarti bagi guru Pkn, dan pendidikan agama karena menguasai materi untuk membentuk kompetensi spiritual dan sosial sementara guru mata pelajaran umum mengalami kendala membentuk kompetensi terutama spiritual sementara yang konten yang dikuasai untuk diajarkan misalkan fisika yang artinya cuma bisa mengantarkan peserta didik untuk menguasai kompetensi kognitif dan keterampilan.

Selain itu, guru juga mengalami kebingungan tentang bagaimana cara mengkorelasikan antara mata pelajaran umum yang diajarkannya dengan KI 1 dan KI 2. Sedangkan untuk mengajarkan KI 3 dan KI 4 saja sudah susah dan butuh waktu yang lama apalagi ditambah juga untuk mengajarkan KI 1 dan KI 2. Lebih lanjut, sangat terbatasnya literatur khusus yang mengkaji tentang korelasi antara KI 3 dan KI 4 dengan KI 1 dan KI 2 pada setiap mata pelajaran umum sehingga wajar saja guru mengalami kebingungan. Ditambah lagi, belum ada pelatihan tertentu untuk guru dari

pemerintah sebagai bekal bagi guru untuk mengajarkann empat kompetensi inti ini terutama ko-relasinya antara antara KI 3 dan KI 4 dengan KI 1 dan KI 2 pada mata pelajaran umum.

Lebih lanjut, Heri Retnawati (2015) dalam penelitiannya mengemukakan Kurikulum2013 menuntut guru untuk dapat mengamati K1, K2, K3, dan K4, kemudian menyimpulkannya dalam suatu nilai. Permasalahan pada umumnya menyangkut sistem penilaian K1 dan K2. Kurikulum 2013 mengarahkan guru agar melakukan penilaian menggunakan teknik observasi, penilaian diri atau penilaian antarteman. Masalah pertama ada pada proses pemilihan instrumen yang tepat untuk mengukur K1 dan K2. Ketepatan pemilihan merujuk pada keefektifan, keefisienan dan objektivitas sistem penilaian. Menurut responden, banyak guru di sekolah yang masih belum memahami sistem penilaian sikap yang baik dan benar. Masalah lain ada pada proses penyusunan instrumen penilaian. Guru masih kesulitan dalam mengembangkan instru-

men penilaian sikap. Masalah pertama adalah kesulitan dalam menentukan indikator sikap yang akan diukur.

Guru harus memperhatikan indikator sikap dengan materi pembelajaran dan rancangan proses pembelajaran. Jika guru tidak jeli, maka dimungkinkan indikator yang dipilih sulit untuk diukur dalam proses pembelajaran. Masalah kedua adalah penjabaran tiap indikator sehingga menjadi butir instrumen yang dapat diamati dan diukur. Proses penjabaran dimulai dengan membuat defini operasional sikap yang akan diukur dari berbagai teori. Definisi operasional kemudian dikembangkan menjadi berbagai butir muatan. Sebagian besar guru masih belum terbiasa dalam melakukan penyusunan instrumen penilaian sikap. Bahkan, beberapa informan menyatakan masih ragu dengan validitas instrumen yang digunakan dalam proses penilaian sikap.

Maka dalam revisi kurikulum 2013 penilaian kompetensi sikap sosial dan spiritual tidak lagi diberikan secara intrakurikuler

pada semua mata pelajaran. Guru matematika atau guru fisika, misalnya, dulunya diwajibkan untuk mengajarkan dan menilai kemampuan siswa dalam kegiatan berdoa. Hasil pembelajaran berdoa ini kemudian dimasukkan dalam penilaian rapor. Kini, dengan penataan ulang terhadap pembelajaran dan penilaian sikap sosial sikap dan spiritual, guru matematika tetap dapat mengajarkan siswanya berdoa, tapi tidak lagi memasukkan penilaian tersebut di dalam laporan hasil belajar siswa (Kemdikbud, 2016).

Pada kondisi ini, 78,27 % guru dinilai puas terhadap penataan kompetensi sikap spiritual dan sosial. Guru apalagi guru

mata pelajaran umum tidak lagi dibebankan dengan keharusan mengajar dan kerumitan menilai KI 1 dan KI 2. Walau secara moral guru tidak bisa melepaskan diri mengajarkan KI 1 dan KI 2 namun guru memandang bisa lebih fokus dalam mengajar aspek kognitif dan keterampilan karena tidak dituntut dengan penilaian KI 1 dan KI 2 yang abstrak dan rumit. Karena sangat didasari untuk mengajarkan KI 3 dan KI 4 saja dalam beberapa kasus peserta didik dan kondisi tertentu sangat sulit apalagi dalam mata pelajaran fisika dan matematika sehingga guru tidak mau waktu habis terbuang menilai KI 1 dan KI 2 yang rumit.

Tabel 1. Tingkat Kepuasan Guru terhadap Penataan Kompetensi Sikap Spiritual dan Sosial

No	Pernyataan
1	Guru tidak terbebani dengan revisi kurikulum 2013 bahwasanya tidak semua guru bidang mata pelajaran harus menilai sikap spiritual dan sosial peserta didik.
2	Guru mengalami kesulitan saat kurikulum 2013 yang belum direvisi dimana menghendaki semua guru harus menilai sikap spiritual dan sosial peserta didik.
3	Meskipun tidak semua guru mata pelajaran diwajibkan menilai sikap spiritual peserta didik, guru tetap diwajibkan mendidik sikap spiritual dan sosial.
4	Guru menegur peserta didik yang bersikap bertentangan dengan norma dan pendidikan karakter.
5	Guru memberi nasehat kepada peserta didik agar berperilaku mulia.
6	Guru memberi contoh teladan yang mulia kepada peserta didik

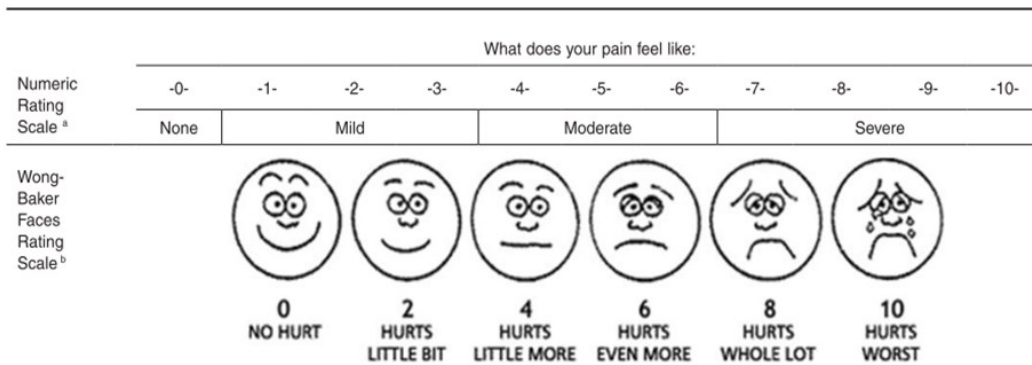
Mayoritas guru menyatakan setuju dengan item-item pernyataan pada tabel 1 tentang penguasaan kembali kompetensi sikap spiritual dan sosial. Padahal pada tahun 2014, awal-awal kurikulum 2013 mulai masuk sekolah menurut hasil penelitian Haryana dkk (2015) menyebutkan bahwa 88% responden menyatakan kewalahan dalam melakukan penilaian otentik tersebut. Mereka menyatakan belum begitu faham dalam menyusun instrumen penilaian dan pelaksanaan penilaiannya. Mereka menyatakan kewalahan karena belum terbiasa dan belum memiliki instrumen penilaian yang akan dipakai. Responden merasakan cukup berat untuk melakukan penilaian semua aspek (spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan). responden mengeluhkan tentang waktu dan tenaga yang harus dikerahkan. Selain kerumitan menilai sikap, sebuah penelitian menyebutkan bahwa guru dinilai kurang menerima pelatihan tentang bagaimana cara mengumpulkan data, mendeskripsikan dan menganalisis data perkembangan

perilaku siswa (Conley, Everett, & Pinkelman, 2019). Penelitian lainnya juga mengungkapkan bahwa perilaku siswa menjadi permasalahan dan perhatian utama di sekolah akan tetapi 65 % tidak atau kurang mendapatkan pelatihan tentang menilai perkembangan sikap siswa (Wills, Caldarella, Mason, Lappin, & Anderson, 2019).

Terlepas dari polemik tentang kerumitan setiap guru mapel harus menilai sikap spiritual dan sosial peserta didik akan tetapi untuk menilai sesuatu yang abstrak seperti sikap spritual dan sosial dibutuhkan cara yang tepat dan tidak sederhana. Ada beberapa cara yang dapat digunakan antara lain penilaian diri sendiri (*self report measures*), penilaian dari teman (*report by peers*), penilaian dari guru yang mengamati. Penilaian ini dilakukan dengan membuat tabel *check list* dimana di dalamnya terdapat beberapa indikator yang dapat mengukur kompetensi sosial. Selain itu juga merumuskan tujuan kompetensi sosial dalam dua jangka waktu yakni jangka pendek dan jangka panjang

(Gambrill & Richey, 1986). Cara lain yang dapat digunakan adalah menggunakan metode *direct behavior rating* (Christ, Tillman, & Chafouleas, 2009). Metode yang didasarkan untuk mengevaluasi

perilaku siswa dengan cara observasi langsung dan penggunaan *rating*. Ilustrasi *rating* dalam menilai sikap tergambar pada gambar di bawah berikut:



Gambar 1. Ilustrasi Penggunaan Metode *Direct Behavior Rating* dalam Menilai Sikap Peserta Didik

Pemakaian penilaian formatif seperti *direct behavior rating* dapat dilakukan dalam menentukan ke depannya *treatment* apa yang cocok. Penilaian sikap siswa dengan yang tepat dan hasil yang valid sangat menentukan langkah atau respon apa yang akan diambil dalam membentuk sikap siswa menjadi lebih baik (Sims, Riley-tillman, & Cohen, 2017). Jenis skala rating yang dapat dipakai dalam melakukan penilaian sikap antara lain 1 = sangat jarang, 2 = jarang, 3 = kadang-kadang dan 4 = sering. Selain itu dalam mengevaluasi

sikap juga dapat dipakai skala, 1 = sangat tidak cocok, 2 = tidak cocok, 3 = netral, 4 = cocok dan 5 = sangat cocok (Landrum, 2015).

Pandangan lain mengemukakan bahwa untuk melihat apakah terjadi perubahan sikap peserta didik maka secara garis besar mesti dilakukan dua hal antara lain menilai sikap sebelum dan setelah diberi perlakuan. Dalam hal ini, beberapa pertanyaan untuk menilai perilaku diberikan dan hasilnya disajikan dalam bentuk *rating*. Sehingga terlihat jelas sikap peserta didik mana yang

belum berubah atau sudah secara signifikan (Worcester, Dunlap,

Murray, & Bradley-klug, 2002).

Question	Preintervention mean ratings	Postintervention mean ratings
Friendships with her peers now are . . .	2	4.2
Ability to express personal preferences is . . .	2.8	4.4
Amount of time spent interacting with peers . . .	2	3.8
The response (friendly or not friendly) Mindy receives from her peers is . . .	2.3	4
Mindy's relationships with her teachers are . . .	2.3	4.4
Mindy's progress in school (i.e., completing tasks, learning new skills) is . . .	2.3	4.4
The child's ability to learn new skills is . . .	3.3	4.0
General happiness is . . .	2.3	3.8
Behavior is appropriate.	1.5	3
I enjoy spending time with Mindy.	2.8	4.2
I would be comfortable being with Mindy on a field trip.	3.3	3.6
I could picture Mindy in a less restrictive environment.	1.8	2.8

Note. 1 = much worse/strongly disagree, 2 = worse/disagree, 3 = slightly better/neutral, 4 = better/agree, and 5 = much better/strongly agree.

Gambar 2. Penggunaan *Pre* dan *Post Intervention* dalam Menilai Sikap

Pendapat lain mengungkapkan bahwa untuk mengevaluasi perilaku peserta didik dapat dilakukan dengan cara *behavioral perceptions*. Terdapat beberapa item-item pernyataan yang menggunakan skala *likert* tentang persepsi guru, siswa sendiri, staff sekolah dan orangtua terhadap perubahan perilaku siswa. Selanjutnya, dibuat skala 1-5, dan rata-rata tertinggi menunjukkan sikap positif yang makin baik (Skaggs, 2006). Namun apapun cara menilai sikap yang dipakai, apakah itu feedback dari siswa, penilaian dari siswa lain atau guru, refleksi diri sendiri, penilaian secara kualitatif ataupun kuantitatif, yang paling penting adalah bagaimana hasil penilaian

sikap siswa tersebut dapat membantu guru dalam membawa perubahan yang bermakna dalam perubahan perilaku siswa (Stigall & Blincoe, 2015).

2. Tingkat Kepuasan Guru terhadap Koherensi Kompetensi Inti-Kompetensi Dasar (KI-KD)

Pada evaluasi yang dilakukan Kemdikbud ditemukan bahwa adanya pemahaman yang kurang tepat oleh masyarakat yang disebabkan oleh format penyajian dan nomenklatur dalam Kurikulum 2013, diantaranya Kompetensi Dasar (KD) pada Kompetensi Inti (KI) yang dianggap kurang logis dikaitkan dengan karakteristik mata pelajaran. Selain itu juga ditemukan indikasi adanya inkonsistensi antara

Kompetensi Dasar (KD) dengan silabus dan buku teks (Kemdikbud, 2016). Maka pemerintah melakukan usaha koherensi kompetensi inti-kompetensi dasar. Hasilnya menunjukkan bahwa guru sebagai pemakai produk hasil usaha pemerintah ini menyatakan 94,29 % puas dengan upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah ini.

Selain itu, dalam konteks ini guru harus mengajarkan dan menilai serta membuat instrumen pengukuran semua KI-KD. Sumber lain mengatakan bahwa Meski pembelajaran sudah dilaksanakan namun belum terbit format RPP dan penilaian Kurikulum 2013. Belum ada petunjuk yang jelas tentang keduanya. Guru di SD Muhammadiyah 11 Semarang belum mendapat materi secara menyeluruh. Hal ini membuat guru kesulitan dalam memahami perencanaan dan penilaian sesuai kurikulum 2013. Guru tidak membuat RPP sebelum melaksanakan pembelajaran (Melati dkk, 2016).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kustijono (2014) dapat diketahui bahwa secara umum

para guru belum sepenuhnya memahami penyusunan RPP yang sesuai dengan Kurikulum 2013. Penyusunan yang belum dipahami tersebut diantaranya: (1) Bahwa sumber belajar dapat dari buku teks pelajaran, internet, lingkungan alam dan sosial; (2) bahwa media pembelajaran dapat bervariasi (baik sederhana maupun canggih/multimedia); (3) bahwa media harus sesuai dengan materi pembelajaran dan menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik; (4) bahwa kegiatan pembelajara mencakup kegiatan-kegiatan pembelajaran pada tahapan-tahapan metode saintifik pada inti pembelajaran; (5) bahwa kegiatan penutup pembelajaran mencakup kegiatan pengayaan dan/atau remidi; (6) bahwa penilaian harus sesuai dengan teknik dan bentuk penilaian autentik; (7) bahwa poenilaian harus sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi; (8) bahwa penilaian harus dilengkapi dengan pedoman penskoran. Kenyataan tersebut dapat dimaklumi karena para guru sebagian besar belum memahami prinsip-prinsip pembela-

jaran dan penilaian yang sesuai dengan kurikulum 2013. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, selama ini para guru dalam menyusun RPP lebih sering mengcopy saja contoh-contoh RPP yang ada dan kurang berusaha menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi sekolah masing-masing. Seiring berjalannya

waktu, sosialisasi kurikulum dan pelatihan terus dioptimalkan sehingga rata-rata mayoritas guru memahami apa target yang harus diajarkan, berkesinambungan antar masing-masing komponen silabus dan RPP sehingga membuat guru mulai menerima pentingnya kehadiran kurikulum 2013 bagi peserta didik.

Tabel 2. Tingkat Kepuasan Guru Terhadap Koherensi Kompetensi Inti-Kompetensi Dasar

No	Pernyataan
B.	Tingkat Kepuasan Guru Terhadap Koherensi Kompetensi Inti-Kompetensi Dasar(KI-KD)
1	Guru menilai antara kompetensi inti 1 (KI 1) berupa sikap spiritual dan sosial dan kompetensi dasar (KD) sudah logis
2	Implementasi revisi kurikulum 2013, guru tidak terbebani lagi membuat indikator penilaian sikap spiritual dan sosial
3	Implementasi revisi kurikulum 2013 dinilai sangat membantu guru dalam perencanaan pembelajaran karena KI dan KD sudah disusun pemerintah.
4	Guru menilai revisi kurikulum 2013 dinilai memuaskan karena penyajian silabus yang lebih efisien dimana dari sebelumnya yang lebih dari 100 halaman menjadi 20 halaman per mata pelajaran.
5	Guru merasa terbantu dengan terbitnya revisi kurikulum 2013, karena silabus tidak lagi bersifat mutlak sehingga yang wajib dipenuhi adalah kompetensi dasar yang harus dipenuhi peserta didik.

Dapat dikatakan mayoritas guru merasa puas dengan upaya koherensi KI-KD ini. Karena harus disadari bahwa keselarasan KI-KD yang merupakan komponen silabus dan RPP menjadi hal yang urgen untuk diperbaiki kare-

na ketidakjelasan hubungan KI-KD akan membuat pembelajaran yang diakomodasi menjadi bingung dan begitu juga peserta didik. Ini dapat berimbas pada pelaksanaan evaluasi dan kualitas hasil evaluasi peserta didik. Bila-

mana KI-KD tidak sejalan maka guru akan hilang arah dalam mengajar karena yang diminta KI seperti ini sedangkan jabaran KD untuk mencapai KI tidak mencerminkan rumusan KI. Maka KI-KD yang sudah relevan memungkinkan guru bisa dengan yakin memilih pendekatan atau metode pembelajaran yang mendukung serta menyusun instrumen penelitian yang mampu mengevaluasi pencapaian peserta didik terhadap KI-KD. Bagaimana jika KI-KD tidak selaras, maka apakah evaluasi dapat menjalankan tugas evaluasi dengan semestinya. Lalu, jika guru tidak dibekali pemahaman membuat silabus dan RPP yang benar sesuai dengan semangat kurikulum 2013, maka apakah pembelajaran dapat berjalan seperti seharusnya.

3. Tingkat Kepuasan Guru terhadap Pemberian Ruang Kreatifitas dalam Mengimplementasikan Kurikulum

Hal lain yang menjadi perbaikan dalam kurikulum 2013 ada-

lah pemberian ruang kreatifitas dalam mengimplementasikan kurikulum bagi guru di kelasnya. Metode pembelajaran menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian dalam perbaikan Kurikulum 2013. Sebagian guru menganggap metode pembelajaran dengan proses berpikir 5M (mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, mengasosiasi, mengomunikasikan) bersifat prosedural dan mekanistik sehingga membelenggu ruang kreatif. Selama ini mereka memandang metode tersebut sebagai satu-satunya pendekatan dalam pembelajaran di semua mata pelajaran. Maka dalam revisi kurikulum 2013 dinyatakan bahwa guru diberi ruang kreatif yang membuat guru memiliki otonomi dalam proses pembelajaran sehingga mendorong pembelajaran yang aktif. Perbaikan itu juga menekankan bahwa pendekatan saintifik bukan satu-satunya pendekatan dalam pembelajaran (Kemdikbud, 2016).

Tabel 3. Tingkat Kepuasan Guru terhadap Pemberian Ruang Kreatifitas dalam Mengimplementasikan Kurikulum

No	Pernyataan
C.	Tingkat Kepuasan Guru Terhadap Pemberian Ruang Kreatifitas dalam Mengimplementasikan Kurikulum
1	Revisi kurikulum 2013, guru tidak merasa terbelenggu lagi seperti sebelum direvisi bahwsanya guru tidak leluasa dalam mengkolaborasikan berbagai metode pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran dan karakteristik peserta didik masing-masing
2	Revisi kurikulum 2013, guru tidak merasa terbelenggu lagi karena guru bebas mengembangkan dan menyusun silabus sendiri sesuai dengan kebutuhan dan koteks yang relevan bagi proses pembelajaran peserta didik.
3	Revisi kurikulum 2013, guru merasa diberi kebebasan dalam menggunakan pendekatan-pendekakatan pembelajaran yang sesuai karakteristik mata pelajaran, kompetensi, dan kondisi daerah sekolah masing-masing.

Dapat dikaakan 100 % guru-guru mata pelajaran pada salah satu sekolah yang telah menjalankan revisi kurikulum 2013 puas dan setuju ada kebijakan bahwa guru diberi ruang untuk berkreasi menggunakan metode, pendekatan pembelajaran di kelas. Angka ini menggambarkan bahwa guru mempunyai kehendak untuk berimprovisasi dan berkreasi sesuai dengan suasana kelas dan psikologis peserta didik. Guru mempunyai keiginan besar untuk tidak mau diatur sedemikian rupa pada hal teknis di lapangan karena menghambar ruang gerak guru dalam berkreasi. Karena mesti

disadari bahwa kondisi kelas di bergaia tempat dan daerah di Indonesia adalah hal yang sangat dinamis, tidak seideal yang dipikirkan regulator sehingga tidak bisa dipaksakan satu metode atau pendekatan pada konten pembelajaran tertentu. Hal ini tidak berarti pendekatan saintifik, metode *problem solving based learning* dan lainnya yang sangat direkomendasikan tidak diterapkan. Beberapa pendekatan dan metode yang menjadi ciri khas kurikulum 2013 adalah perubahan besar yang dijalankan demi perbaikan mutu pembelajaran dan *output* pendidikan namun bukan-

lah metode yang mutlak dan satu-satunya yang dipersepsikan bagi sebagian guru menghambat otonomi dan kreatifitas guru dalam mengajar.

Penelitian yang dilakukan Bintari dkk (2014) menyebutkan bahwa pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan pendekatan saintifik sesuai Kurikulum 2013 di kelas VII SMP Negeri 2 Amlapura menunjukkan bahwa langkah-langkah kegiatan dalam pendekatan saintifik yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengomunikasikan tampak dalam kegiatan pembelajaran dan terlaksana dalam dua kali pertemuan serta tidak bisa diselesaikan dalam satu kali tatap muka. Ini dikarenakan terkendala waktu dan kemampuan peserta didik dalam mencerna materi pelajaran. Maka revisi kurikulum 2013 memberi ruang kreatifitas pada guru dalam mengakomodasi pendekatan dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi nyata di kelas.

D. SIMPULAN

Lahirnya regulasi revisi kurikulum 2013 merupakan langkah evaluasi awal yang dilakukan pemerintah untuk menin-

jau kembali respon dari guru dan praktisi terhadap penerapan kurikulum 2013 di lapangan. Karena apa yang dipikirkan regulator tak selalu seideal apa yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana respon kepuasan guru sebagai orang yang berkuasa penuh terhadap penerapan revisi kurikulum 2013 di lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa 90,85 % guru menyatakan puas dan setuju dengan kehadiran revisi kurikulum 2013. Tingkat kepuasan dilihat dari tiga dari empat pokok perbaikan yang ada dalam revisi kurikulum 2013, yakni, Pertama, sebanyak 78,27 % guru puas dengan upaya penataan kembali kompetensi sikap spiritual dan sosial pada semua mata pelajaran. Kedua, sebanyak 94,29 % guru mata pelajaran menyatakan setuju dengan koherensi KI-KD dan penyelarasan dokumen. Ketiga, dominasi guru mengungkapkan kepuasan mereka dengan pemberian ruang kreatif kepada guru dalam mengimplementasikan kurikulum dalam regulasi revisi kurikulum 2013. Dengan demikian berarti regulasi baru ini dapat dianggap sudah mampu menyelesaikan konflik awal kehadiran kurikulum 2013.

D. DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Y. (2014). *Desain Sistem Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum 2013*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Akuntono, I. (2014, Desember 12). *Kompas*. Diakses dari Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2014/12/12/12280881/Kurikulum.dan.Pertimbangan.yang.Tak.Terungkap>
- Allison, K. R., Silverman, G., & Dignam, C. (1990). Effects on Students of Teacher Training in Use Of A Drug, 20(1), 31–46. <https://doi.org/10.2190/HDRV-3RYR-56FY-YM1X>
- Ansyar, M. (2015). *Kurikulum; Hakikat, Fondasi, Desain dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bengston, E. (2014.). Principals Socialization Whose Responsibility Is It ?, 725–752. <https://doi.org/10.1177/105268461402400406>
- Bintari, N. L. G. R. P., Sudiana, I. N., & Putrayasa, I. B. (2014). Pembelajaran Bahasa Indonesia Berdasarkan Pendekatan Saintifik (Problem Based Learning) Sesuai Kurikulum 2013 di Kelas VII SMP Negeri 2 Amlapura, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*, 3(1).
- Christ, T. J., Riley-Tillman, T. C., & Chafouleas, S. M. (2009). Foundation for the Development and Use and Evaluate Student Behavior, 201–213.
- Conley, K. M., Everett, S. R., & Pinkelman, S. E. (2019). Strengthening Progress Monitoring Procedures for Individual Student Behavior Support. <https://doi.org/10.1177/1074295619852333>
- Fattah, N. (2014). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Gambrill, E. D., & Richey, C. A. (1986). Criteria Used to Define an Evaluate Socially Competent Behavior among Women, 183–196.
- Hamalik, O. (2008). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Haryana, G., & Gimin, G. (2015). Hambatan yang Dihadapi Guru Ekonomi SMA dalam Implementasi Kurikulum 2013 di Kota Pekanbaru. *PEKBIS (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis)*, 7(2), 146-151.
- Hasbullah. (2015). *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kemdikbud, B. K. (2016). *Empat Pilar Kurikulum 2013*. Jakarta: Majalah Jendela Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud.
- Kustijono, R., & HM, E. W. (2014). Pandangan Guru terhadap Pelaksanaan Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran Fisika SMK di Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Fisika dan Aplikasinya (JPFA)*, 4(1), 1-14.
- Landrum, R. E. (2015). Faculty Perceptions Concerning the Frequency and Appropriateness of Student Behaviors, 38(4), 269–272. <https://doi.org/10.1177/0098628311421328>
- Machado, E. (2006). The Family Curriculum: Socialisation Process , Family Network and the Negotiation of Police Identities, 39(2), 248–267.
- Melati, E. R., & Utanto, Y. (2016). Kendala Guru Sekolah Dasar

- dalam Memahami Kurikulum 2013. *Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology Studies*, 4(1), 1-9.
- Putera, A. D. (2014, Desember 5). *Kompas*. Diakses dari Kompas: <https://edukasi.kompas.com/read/2014/12/05/20042411/MulaiSemester.Genap.Kurikulum.2013.Dihentikan>
- Retnawati, H. (2015). Hambatan Guru Matematika Sekolah Menengah Pertama dalam Menerapkan Kurikulum Baru. *Cakrawala Pendidikan*, (3).
- Riyani, W. E. (2014, Desember 13). *Okezone News*. Diakses dari Okezone News: <https://news.okezone.com/read/2014/12/13/65/1078818/polemik-kurikulum-2013-anies-salahkan-m-nuh>
- Ruslan, T. F., & Alawiyah, T. (2016). Kendala Guru dalam Menerapkan Penilaian Autentik di SD Kabupaten Pidie. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Unsyiah*, 1(1), 147-157.
- Rusman. (2015). *Pembelajaran Tematik Terpadu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sims, W. A., Riley-tillman, C., & Cohen, D. R. (2017). Formative Assessment Using Direct Behavior Ratings: Evaluating Intervention Effects of Daily Behavior Report Cards. <https://doi.org/10.1177/1534508417708183>
- Skaggs, G. (2006). Relationships Between Character Education, Implementing Student Behavior, Achievement and Student, 18(1), 82–114.
- Stigall, L., & Blincoe, S. (2015). Student and Instructor Use of the Teacher Behavior Checklist, 42(4), 299–306. <https://doi.org/10.1177/0098628315603061>
- Syafaruddin. (2008). *Efektifitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Waldeck, J. H. (2004). Technology Use and Organizational, 41(2), 137–165. <https://doi.org/10.1177/0021943604263290>
- Wang, T. (2019). Competence for Students ' Future: Curriculum Change and Policy Redesign in China. <https://doi.org/10.1177/2096531119850905>
- Wills, H. P., Caldarella, P., Mason, B. A., Lappin, A., & Anderson, D. H. (2019). Improving Student Behavior in Middle Schools : Results of a Classroom Management Intervention. <https://doi.org/10.1177/1098300719857185>
- Worcester, J., Dunlap, G., Murray, M., & Bradley-klug, K. (2002). Using Multiple Measures to Evaluate Positive Behavior Support :, 4(3), 131–145.